



**H. BAMBANG PU DJIONO, SH
BUPATI GROBOGAN**



**H. ICEK BASKORO, SH
WAKIL BUPATI GROBOGAN**

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH AKHIR MASA JABATAN (ILPPD-AMJ)
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BHAKTI 2006 - 2011**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 131/2158/2010 tanggal 12 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, maka Jabatan Bupati Grobogan periode 2006-2011 telah memasuki akhir masa jabatan.

Selanjutnya sesuai Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) kepada Pemerintah, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) kepada DPRD, serta Informasi LPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) disampaikan kepada masyarakat.

Informasi LPPD di akhir masa jabatan yang disampaikan kepada masyarakat merupakan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (LPPD-AMJ) yang selanjutnya disebut ILPPD AMJ 2006-2011, yang memuat :

1. Ringkasan Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
2. Ringkasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.
3. Ringkasan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, penyusunan ILPPD AMJ ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan tahun 2006-2011, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan dan/atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud.

Tanggapan dan/atau saran itu oleh pemerintah daerah selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan program kerja dan/atau peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Tanggapan dan/atau saran itu disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah informasi LPPD AMJ disampaikan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
3. PERMENDAGRI Nomor 7A Tahun 2007 dan Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Surat MENDAGRI tanggal 8 Mei 2007 Nomor 188.32.04/558-DV perihal PERMENDAGRI Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Perkembangan Pembangunan Manusia di Kabupaten Grobogan sebagai salah satu tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sesuai ketentuan UNDP Human Development Report 2001, bahwa Pembangunan Manusia diukur berdasarkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indek komposit dari indikator angka melek huruf (pendidikan), indikator angka harapan hidup (kesehatan masyarakat), dan indikator kemampuan daya beli masyarakat (perkembangan ekonomi).

Pembangunan Manusia di Kabupaten Grobogan berdasarkan IPM tersebut, mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Nilai IPM Tahun 2005, sebesar 67,60 dan berada pada urutan ke 29 di Jawa Tengah. Sedangkan Tahun 2008 meningkat menjadi 70,22 dan berada pada urutan ke 24. Nilai IPM ini masuk pada kategori menengah-atas, dan perlu juga diketahui, bahwa IPM merupakan variabel bebas yang sifatnya *state*, yaitu sebuah variabel yang perubahannya berlangsung sangat lambat dan akan meningkat atau menurun

sedikit demi sedikit sebagai respon terhadap perubahan berbagai kondisi fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Selanjutnya diuraikan secara singkat, diawali gambaran umum kondisi demografi. Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan selama 5 (lima) tahun bertambah sebanyak 30.498 jiwa atau meningkat dari 1.378.461 jiwa pada Tahun 2006 menjadi 1.408.959 jiwa pada Tahun 2010. Artinya kita telah mampu menekan laju pertumbuhan penduduk dengan Tingkat Pertumbuhan Penduduk rata-rata sebesar 0,58%.

Sedangkan rata-rata Sex Ratio Penduduk dari Tahun 2006 sampai dengan 2010 mencapai 98%, yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 98 jiwa penduduk laki-laki. Demikian juga untuk Tingkat Kepadatan Penduduk juga mengalami peningkatan yaitu dari 698 jiwa/km² menjadi 713 jiwa/km².

Adapun peningkatan kualitas hidup manusia di bidang pendidikan sebagai indikator pertama IPM, yang diukur dari capaian kualitas pendidikan masyarakat berdasarkan rata-rata lama sekolah, mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2005 sebesar 6,60 menjadi 6,86 pada Tahun 2009, demikian juga angka melek huruf mengalami peningkatan dari 86,80% menjadi 90,21%.

Selain itu dapat dilihat juga pada tingkat partisipasi pendidikan masyarakat dari peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), dimana pada Tahun 2006 - 2009 diketahui bahwa partisipasi pendidikan masyarakat cenderung meningkat, khususnya untuk tingkat pendidikan dasar 9 tahun. Ini menunjukkan adanya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai pendidikan dasar 9 tahun semakin meningkat.

Sedangkan jumlah kelulusan dari Tahun 2006 sampai dengan 2009 juga mengalami peningkatan, dan persentase peningkatan terbesar pada tamatan Tingkat Akademi dan Sarjana yaitu sebesar 39%, kemudian diikuti Tamatan SLTP, SLTA dan Tamatan SD. Hal ini berarti tingkat kualitas pendidikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Adapun indikator IPM yang kedua di bidang Kesehatan dapat dilihat dari Perkembangan Angka Harapan Hidup, dimana Tahun 2005 terhitung sebesar 68,40 dan meningkat menjadi 69,42 pada Tahun 2009, artinya kenaikan usia lama hidup seseorang tersebut merupakan gambaran kualitas hidup masyarakat yang dicapai melalui tingkat kesehatan yang tinggi, asupan gizi yang baik serta perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat.

Perkembangan kesehatan masyarakat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) dalam 5 tahun terakhir, yang mengalami trend naik turun. Terendah terjadi pada Tahun 2008, sedangkan terbesar terjadi pada Tahun 2009 yaitu 191,61 yang berarti pada tahun itu terdapat kematian ibu sebesar 192 orang dari 100.000 ibu yang melahirkan bayi hidup. Begitu pula Angka Kematian Bayi lahir (AKB) pada kurun waktu Tahun 2006 sampai dengan 2009 juga mengalami naik turun.

Sedangkan Prevalensi Gizi Kurang pada anak balita terjadi penurunan dari tahun ke tahun, Tahun 2009 tercatat sebesar 0,02%, Tahun 2008 sebesar 0,03% dan Tahun 2006 sebesar 0,04%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas gizi anak balita.

Indikator IPM yang ketiga yaitu Kemampuan Daya beli Masyarakat, juga mengalami perbaikan, yang ditunjukkan dengan besarnya pengeluaran riil per kapita per tahun, yaitu sebesar Rp.614.500,- pada Tahun 2005 menjadi Rp. 627.600,- pada Tahun 2008. Jika dilihat dari kondisi kemampuan daya beli masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Gobogan mengalami perbaikan peringkat yaitu dari urutan 35 menjadi 29.

Lebih rinci pembangunan di sektor Ekonomi, terus mengalami pertumbuhan. Kemajuan ini dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan, dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan berturut-turut sebesar 4,00, 4,37, 5,33 dan 5,03. Sedangkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 12,89, 13,40, 13,75 dan pada Tahun 2009 sebesar 11,17.

Demikian juga dengan PDRB Perkapita, atas dasar Harga Konstan, yaitu sebesar Rp.1.886.136,- pada Tahun 2006, Rp.1.680.424,- pada Tahun 2007, Rp.2.119.636,- pada Tahun 2008, dan Rp.2.212.710,- pada Tahun 2009. Sedangkan PDRB Perkapita atas dasar Harga Berlaku terhitung sebesar Rp.2.924.647,- pada Tahun 2006, Rp.3.295.927,- pada Tahun 2007, Rp.3.727.138,- pada Tahun 2008, dan Rp.4.118.532,- pada Tahun 2009.

Tingkat Inflasi pada Tahun 2010 jika dibandingkan Tahun 2006 mengalami penurunan yaitu dari 7,26 menjadi 4,81 per September 2010. Hal ini menunjukkan pada Tahun 2010 nilai barang lebih sedikit mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2006, sehingga daya beli masyarakat dan pergerakan perekonomian menjadi lebih cepat.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pemerataan pendapatan masyarakat, pada umumnya dapat dilihat dari indikator nilai **Indeks Gini Ratio** dan **Proporsi Pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk yang berpendapatan terendah** sesuai Kriteria Bank Dunia.

Berdasarkan kedua indikator distribusi pendapatan masyarakat tersebut, Kabupaten Grobogan pada Tahun 2009 dalam kategori ketimpangan rendah (**low inequality**). Hal ini dibuktikan dengan nilai Indeks Gini Ratio selama empat tahun berturut-turut dari Tahun 2006 sampai 2009 selalu berada di bawah angka ketimpangan yaitu 0,35. Demikian juga dilihat dari indikator Proporsi Pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk yang berpendapatan terendah, dalam empat tahun berturut-turut dari Tahun 2006 sampai 2009 selalu berada dalam ketimpangan rendah atau di atas 12%.

Kondisi jenis pekerjaan penduduk di Kabupaten Grobogan pada Tahun 2006 sampai dengan 2010 masih dominan pada jenis mata pencaharian pertanian diikuti perdagangan. Namun demikian perkembangannya dalam kurun

waktu 5 tahun, lapangan pekerjaan di bidang pertanian cenderung menurun, bergeser pada lapangan pekerjaan perdagangan yang cenderung meningkat.

Selanjutnya perkembangan jumlah Penduduk miskin berdasar indikator makro dalam lima tahun mengalami penurunan yang cukup berarti. Data jumlah Penduduk miskin dari Tahun 2006 sampai dengan 2009 menurun yaitu dari 361.900 jiwa menjadi 264.939 jiwa. Demikian juga halnya secara persentase penduduk miskin dari jumlah total penduduk yaitu dari Tahun 2006 sebesar 27,6%, Tahun 2007 sebesar 25,48%, Tahun 2008 sebesar 19,82% dan di Tahun 2009 sebesar 18,68%.

C. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka menjalankan visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD dan penjabarannya melalui RKPD, tentunya harus didukung pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam wujud APBD telah dilaksanakan sesuai prinsip Keadilan, Efisiensi dan Efektifitas, Anggaran Berimbang dan Dinamis, Disiplin, Transparansi, serta Akuntabilitas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah, disusun menggunakan pendekatan kinerja (*activity base*), yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian kinerja yang mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*impact*) dari setiap kegiatan.

Dengan sistem anggaran yang berbasis kinerja, dan adanya keterkaitan antara program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan disamping dapat mencapai *output*, *outcome*, *impact* yang telah ditargetkan, juga diharapkan akan secara nyata dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, yang kemudian secara kumulatif akan memungkinkan tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun secara teknis, struktur APBD Kabupaten Grobogan, disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun struktur APBD meliputi, pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Selanjutnya, secara ringkas disampaikan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Akhir Masa Jabatan Tahun 2006 - 2011 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan dari Tahun 2006 sampai dengan 2009 mengalami peningkatan 31% yaitu dari Rp.639.047.881.121,- menjadi Rp.843.180.476.379,-. Realisasi Pendapatan APBD ini disumbang dari

komponen PADS sebesar 9,1%, Dana Perimbangan sebesar 84,6% serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 6,3% dari total Pendapatan Daerah.

Sedangkan realisasi pendapatan Tahun 2010 sampai dengan Bulan Agustus sebesar 72% dari target Rp. 870.280.107.000,-.

2. Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah dari Tahun 2006 sampai dengan 2009 mengalami peningkatan sebesar 39,7% yaitu dari Rp.582.165.712.069,- menjadi Rp.813.339.696.881,-. Komposisi Belanja Daerah ini terdiri dari Belanja Langsung sebesar 32% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 68% dari total Belanja Daerah.

Sedangkan realisasi Belanja Tahun 2010 sampai dengan Bulan Agustus sebesar 58% dari target Rp. 873.479.988.000,-.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Untuk itu dalam keadaan APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Dari Tahun 2006 rata-rata Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Tahun 2006 - 2009 sebesar Rp.56.851.553.819,-.

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

Visi Kabupaten Grobogan tahun 2006-2011 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan yang maju, mandiri, berbadan sehat dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertumpu pada keunggulan di bidang pertanian, perdagangan, industri kecil, dan pariwisata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”

Berdasarkan visi untuk 5 tahun tersebut, maka **misi untuk 5 tahun mendatang** adalah :

1. Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pengelolaan dan pemasarannya untuk mendukung pengembangan perdagangan dan industri kecil guna meningkatkan perekonomian daerah.

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah, melalui penciptaan sistem perijinan yang mudah, murah dan cepat guna mendukung peningkatan investasi dan penanaman modal.
3. Meningkatkan daya tarik dan pengelolaan potensi wisata daerah.
4. Meningkatkan peran koperasi, agar benar-benar menjadi soko guru perekonomian daerah, regional dan nasional
5. Menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur), serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan olah raga.
7. Menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi dan penegakan hukum.
8. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan, khususnya kaum wanita.
9. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban, agar masyarakat dapat beraktifitas dengan tenang.
10. Mengenali dan memberdayakan potensi PAD dengan tetap memperhatikan kemampuan dan tidak menghambat perekonomian masyarakat.
11. Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan dunia pendidikan.
12. Mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya.
13. Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai perkembangan keadaan sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih.

B. ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Arah Kebijakan Umum yang menjadi panduan dalam melakukan langkah kerja berupa program-program pembangunan dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penataan kembali sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Mengurangi jumlah penduduk miskin, melalui berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung.
3. Meningkatkan jumlah dan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) di Kabupaten Grobogan, baik SDM aparatur Pemerintahan (eksekutif dan legislatif) maupun SDM masyarakat secara keseluruhan, menekan jumlah penduduk dan melaksanakan Keluarga Berencana.

4. Penataan kembali hubungan kerja yang lebih fungsional, proposional dan terbuka secara kelembagaan baik internal maupun eksternal, termasuk seluruh komponen masyarakat.
5. Memperluas penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat menampung permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan sehingga TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) akan semakin meningkat, sementara TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) akan semakin menurun.
6. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap ke arah yang lebih baik (pendidikan formal maupun non formal), sehingga tingkat pendidikan penduduk yang lulus dari berbagai jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun jenjang pendidikan tinggi semakin meningkat.
7. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan secara bertahap ke arah yang lebih baik.
8. Penghematan dan penguatan sistem kemasyarakatan yang majemuk.
9. Mengurangi tingkat ketergantungan anggaran pembiayaan pembangunan daerah secara berlebihan dari pemerintah pusat.
10. Menciptakan iklim usaha dan produktifitas hasil-hasil industri kerajinan dan industri rumah tangga yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.
11. Mengurangi tingkat kesenjangan laju pertumbuhan dan pembangunan antar wilayah.
12. Menjaga keseimbangan dan kelestarian alam, melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
13. Pembangunan infrastruktur wilayah dan pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta potensi lainnya, pariwisata dan industri kecil.

C. PRIORITAS DAERAH

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, agar kinerja dapat profesional, jujur mampu memimpin dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan memberikan perhatian serta pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga tercipta pemerintah yang bersih dan berwibawa.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, untuk menjamin agar program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang paling diperlukan oleh masyarakat.
3. Peningkatan pembangunan perekonomian daerah melalui peningkatan produk unggulan, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan daya saing, pengembangan jaring distribusi pemasaran produk unggulan daerah.
4. Mengoptimalkan potensi wilayah dengan prioritas pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan.

5. Peningkatan dunia usaha melalui Usaha Kecil Menengah (UKM), Industri Kecil Menengah (IKM), pariwisata, dengan membuang peluang investasi untuk sektor industri menenga dan sektor pertambangan.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan biaya yang terjangkau.
7. Menggali berbagai potensi sumber pendanaan untuk membiayai program pembangunan di Kabupaten Grobogan terutama infrastruktur jalan, jembatan, sarana irigasi, sarana perdagangan, pendidikan dan kesehatan.

III. URUSAN DESENTRALISASI

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya dalam artian bahwa daerah berhak mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka dalam pencapaian Visi Misi senantiasa dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, selama 5 (lima) tahun telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.456.882.747.404,-. Untuk Tahun 2006 - 2009 terealisasi 88%, dan Tahun 2010 sampai akhir Bulan Agustus terealisasi 37%.

Adapun untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, **digunakan Indikator Kinerja Kunci** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri nomor : 120/1875/OTDA tanggal 5 September 2008 perihal Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Tahun 2007 dalam rangka EKPPD.

Pelaksanaan dan Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Daerah secara ringkas diuraikan, sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. Urusan Pendidikan

Pelaksanaan Urusan Pendidikan selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 148.393.561.310,- dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 89,9%, sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 28%.

Adapun capaian Urusan Pendidikan, dapat dilihat dari indikator kunci sebagai berikut :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pesertanya meningkat dari 41.304 menjadi 46.178 anak.

- b. Penduduk yang berusia diatas 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara), tingkat capaian kinerja meningkat dari 90,18% menjadi 91,2%.
- c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 99% yang artinya hampir seluruh anak usia SD telah sekolah.
- d. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, dengan tingkat capaian kinerja Tahun 2007 sebesar 81% atau 48.466, meningkat untuk Tahun 2009 sebesar 83,46% atau sebesar 69.814.
- e. Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C, tingkat capaian kinerja meningkat dari 25% atau 17.965, menjadi sebesar 45% atau 36.746 pada Tahun 2009.
- f. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 0,05% atau sebesar 97 siswa.
- g. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs, tingkat capaian kinerjanya membaik dari 0,64% atau 474 menjadi 0,03% atau 19 anak.
- h. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA, dengan tingkat capaian kinerja membaik dari 1,12% menjadi 0,08%, yaitu dari 282 anak turun menjadi 22 anak.
- i. Angka Kelulusan (AL) SD/MI, tingkat capaian kinerja rata-rata mencapai 99% atau sebesar 25.918 siswa.
- j. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 90,4% atau sebesar 17.540 siswa.
- k. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA, tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 98,15% atau 7.995 siswa.
- l. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 77,2% atau sebesar 17.610 siswa.
- m. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, tingkat capaian kinerja sebesar 58,6% atau sebesar 10.687 siswa.
- n. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, tingkat capaian kinerja meningkat dari 34% menjadi sebesar 47,82%, atau dari 4.117 guru menjadi 6.997 guru.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya Pembangunan dan rehabilitasi gedung SD dan SMP/MTs sebanyak 33 unit dan 592 unit; Beasiswa bagi 5431 keluarga tidak mampu; Bantuan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan di 650 lokasi; Pembangunan RKB, ruang laborat dan perpustakaan sebanyak 23 unit; Pengadaan peralatan dan buku penunjang pelajaran sebanyak 20 paket; Penunjangan peningkatan mutu pendidikan 25 Bidang Studi; Penyetaraan bagi

1.900 guru; Bantuan pengembangan profesi guru Dikdas dan Dikmen sebanyak 5.470 orang; Sertifikasi guru sebanyak 994 orang; Pengelolaan sekolah filial dan sekolah satu atap sebanyak 109 sekolah.

2. Urusan Kesehatan

Pelaksanaan Urusan Kesehatan selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 182.967.118.020, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 95,5%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 49,5%.

Adapun capaian Urusan Kesehatan, dapat dilihat dari indikator kunci sebagai berikut :

- a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, tingkat capaian kinerja meningkat dari 1.300 menjadi 4.838 komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif.
- b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 85% atau sebesar 20.426 ibu bersalin.
- c. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), tingkat capaian kinerja rata-rata mencapai 74% atau sebesar 200 desa/kelurahan UCI dari total 280 desa/kelurahan.
- d. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 100%, atau dari 19 balita gizi buruk yang ditemukan kesemuanya mendapat perawatan.
- e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata mencapai 41%, atau setiap tahunnya sebanyak 350 penderita TBC BTA yang ditemukan dan diobati dari 1099 penderita yang diperkirakan.
- f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, tingkat capaian kinerja rata-rata mencapai 95%, atau sebanyak 633 penderita yang ditangani dari 651 penderita yang ditemukan.
- g. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 47% atau sebesar 257.978 kunjungan pasien masyarakat miskin dari total masyarakat miskin sebesar 547.709.
- h. Cakupan kunjungan bayi, tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 96,3%, atau sebesar 20.074 bayi yang memperoleh pelayanan standar dari rata-rata jumlah seluruh bayi lahir hidup setiap tahunnya yaitu sebesar 20.904 bayi.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya Pengadaan obat operasional puskesmas dan perbekalan kesehatan; pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

sebanyak 50 paket; Peningkatan Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan di 52 lokasi; Peningkatan Fungsi Polindes di 85 lokasi; Perbaikan Gizi Masyarakat di 60 desa; Pembinaan Kesehatan Keluarga di 150 lokasi; Pemberian Imunisasi di seluruh desa/kelurahan; Penunangan Pasien Miskin sebanyak 300 orang; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Jamkesmasda.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 516.826.999.950,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 83,1%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 21,1%.

Adapun capaian Urusan Pekerjaan Umum, dapat dilihat dari indikator kunci sebagai berikut :

- a. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, pada Tahun 2006 sepanjang 265,8 Km menjadi 278 Km atau naik sebesar 4,6%.
- b. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik, meningkat dari 62,5% menjadi 78,2% dari luas irigasi 48.127,81 hektar.
- c. Rumah Tangga Per Sanitasi, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 72% yaitu sebesar 250.944 keluarga bersanitasi dari jumlah rata-rata seluruh keluarga sebesar 352.821.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya Pra Survey pembangunan jalan, Peningkatan jalan di 421 lokasi, Perbaikan saluran di 16 lokasi, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di 11 lokasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi Saluran Sekunder di 54 lokasi, Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air di 6 lokasi dan Normalisasi avour di 15 lokasi.

Disamping itu untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan Pemerintah Kabupaten melakukan pinjaman kepada Bank BPD Jateng sebesar Rp.95.000.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Milyard Rupiah), yang pengembalian pokok angsuran dan bunganya diansur selama 2 tahun. Dana tersebut digunakan untuk peningkatan jalan sepanjang 33.176 km (beton 30.435 km dan Hotmix 2,741 km) yang ditempuh melalui 30 kegiatan.

4. Urusan Penataan Ruang

Pelaksanaan Urusan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 1.059.550.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 98,4%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 65,8%.

Adapun capaian Urusan Penataan Ruang, dapat dilihat dari indikator kunci Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 56,1% atau sebesar 111.846,07 km².

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Peninjauan Kembali 3 RUTRK Kecamatan, Peninjauan kembali Perda Tentang IMB dan peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Grobogan.

5. Urusan Perumahan

Pelaksanaan Urusan Perumahan selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.7.700.663.250,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 94,4%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 46,3%.

Adapun capaian Urusan Perumahan, dapat dilihat dari indikator kunci sebagai berikut :

- a. Rumah tangga pengguna air bersih, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 50,09%, atau dari 358.714 rumah tangga, 179.366 diantaranya telah menggunakan air bersih.
- b. Rumah layak huni, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 93%, atau dari 385.558 rumah, 287.661 diantaranya adalah rumah layak huni.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya 1 paket Penanganan Kampung Kumuh Kota Gubug, Penataan 12 paket Lingkungan Kota, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa dan Sanitasi di 20 desa, Pembangunan Air Bersih berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 29 lokasi dan Rehabilitasi 1 unit Sarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 20.890.968.675,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 94,8%. Sedangkan realisasi Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 48%.

Adapun capaian Urusan Perencanaan Pembangunan, dapat dilihat dari indikator kunci yaitu : Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, serta Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD telah terakomodasi 100%.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya Penyusunan Indikator Kinerja dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan, Penyusunan Pra Survey, Rencana Induk, Pengembangan Pusat Data dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, serta Koordinasi perencanaan pembangunan.

7. Urusan Perhubungan

Pelaksanaan Urusan Perhubungan selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 9.746.922.440,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 -

2009 sebesar 93,2%. Sedangkan realisasi Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 40,8%.

Adapun capaian Urusan Perhubungan, dapat dilihat dari indikator kunci Rasio Angkutan Darat dengan Rasio Jumlah Penumpang selama satu tahun, yaitu 1 angkutan untuk 2.061 penumpang.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya Inventarisasi 67 daerah rawan kecelakaan, Penataan Lingkungan terminal Sub Angkota dan Pangkalan Truck, Pengadaan dan pemasangan 100 unit rambu-rambu lalu lintas dan Pelatihan 20 Petugas lalu Lintas di Lingkungan Dinas terkait.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 17.142.732.200,- dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 96,6%. Sedangkan realisasi untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 30%.

Adapun capaian Urusan Lingkungan Hidup, dapat dilihat dari indikator kunci sebagai berikut :

- a. Penanganan sampah, tingkat capaian kinerjanya rata-rata sebesar 71% atau 876,94 m³.
- b. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, tingkat capaian kinerjanya mencapai rata-rata 52% atau 42 perusahaan dari 98 perusahaan wajib amdal yang ada.
- c. Rasio jumlah kasus lingkungan yang telah ditangani mencapai 100% terhadap 10 kasus.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya 7 paket Pembangunan/peningkatan Sarana dan Prasarana TPA, 5 paket Pembangunan/Perbaikan Landasan Kontainer, 1 unit Pembuatan IPAL Terminal Induk Purwodadi, 2 unit Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT), Pengadaan Tanaman Penghijauan 6474 batang dan Pelatihan 100 Kader Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Urusan Pertanahan

Pelaksanaan Urusan Pertanahan selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 3.985.815.000,- dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 64,4%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 73,1%.

Adapun capaian Urusan Pertanahan, dapat dilihat dari indikator kunci sebagai berikut :

- a. Luas lahan bersertifikat, tingkat capaian kinerjanya mencapai 70%, yaitu 138.311,89 Ha dari 197.586,42 Ha.

- b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara, tingkat capaian kinerjanya mencapai 100%, atau telah menyelesaikan kasus sebanyak 392 bidang tanah.
- c. Penyelesaian Ijin Lokasi, tingkat capaian kinerja mencapai 86,36% atau 19 ijin dari 22 permohonan ijin yang ada.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya Pensertifikatan Tanah Aset PemKab Eks. Bondo Desa/Kelurahan sebanyak 155 bidang, Pensertifikatan Tanah Masal Melalui Prona Daerah sebanyak 600 bidang, serta Fasilitasi Sengketa Tanah dan Pemanfaatan Tanah Kosong dan Penyelesaian konflik pertanahan.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.13.919.163.500,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 sampai dengan 2009 sebesar 91,6%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 69,6%.

Adapun capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat dari indikator kunci sebagai berikut :

- a. Kepemilikan KTP, tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 87,85%, atau sebanyak 882.087 penduduk dari 1.009.772 penduduk.
- b. Kepemilikan akta kelahiran, meningkat dari 20 menjadi 131 akta per 1000 penduduk.
- c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, telah dimulai pada Tahun 2008.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya Pelaksanaan Program SIAK, Pengembangan Data Base Kependudukan, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, dan Pengadaan Sarana Pelayanan Akta dan Sarana Pencatatan Perkawinan.

11. Urusan Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan Urusan Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.5.370.383.000,-, dengan realisasi anggaran dari Tahun 2006 - 2009 sebesar 96,7 %. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 45,6%.

Adapun capaian Urusan Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat dilihat dari indikator kunci sebagai berikut :

- a. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas, rata-rata sebesar 75,8%.
- b. Partisipasi angkatan kerja perempuan, meningkat dari 47,08% menjadi sebesar 66,65%.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Penyadaran Pengarusutamaan Gender bagi 854 orang, Pembinaan dan

Fasilitasi P2MBG bagi 60 orang, Advokasi Inisiasi ASI Eksklusif 60 orang dan Penyaluran Bantuan Lanjut 60 orang Usia Tidak Produktif dan Lansia Terlantar.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp 5.157.410.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 97,5%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 41,4%.

Adapun capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dapat dilihat dari indikator kunci Prevalensi Peserta KB Aktif, tingkat capaian kinerjanya rata-rata mencapai 76,47%, atau sebanyak 215.895 peserta program KB.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya Pengelolaan Alkon & Non Alkon KKB di 47 klinik, Pembinaan Keluarga Berencana di 19 kecamatan, Pelayanan KB PIL bagi 10.000 orang dan Pelayanan KB Medis Operasi sebanyak 248 orang.

13. Urusan Sosial

Pelaksanaan Urusan Sosial selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 6.669.372.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 98,5%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 46,6%.

Adapun capaian Urusan Sosial, dapat dilihat dari indikator kunci sebagai berikut :

- a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, sebanyak 31 buah.
- b. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, tingkat capaian kinerja rata-rata mencapai 91,6%, atau dari 64.551 PMKS, 56.205 diantaranya telah tertangani.
- c. PMKS yg memperoleh bantuan sosial, tingkat capaian kinerja meningkat dari 46% menjadi 100%, atau dari 26 PMKS, meningkat menjadi 31.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo; serta Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin, bagi eks Penyandang Penyakit Sosial; dan bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal.

14. Urusan Ketenagakerjaan

Pelaksanaan Urusan Ketenagakerjaan selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.5.014.665.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 97%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 56,8%.

Adapun capaian Urusan Ketenagakerjaan, dapat dilihat dari indikator kunci Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, yang meningkat dari 63,5% menjadi 85% dari penduduk usia 15 tahun keatas.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Pengadaan 2 paket Peralatan Pendidikan Dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja, Pelatihan Ketrampilan Komputer bagi 34 pencari Kerja, Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja, dan Pelatihan Ketrampilan Otomotif bagi 73 orang.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.5.189.956.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 94,7%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 57,5%.

Adapun capaian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dapat dilihat dari indikator kunci sebagai berikut :

- a. Koperasi aktif, meningkat dari 299 koperasi menjadi 346 koperasi.
- b. Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 22.185.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya Revitalisasi Kelembagaan 235 koperasi, Peningkatan Ketrampilan bagi 80 Pengelola dan Pengawas KUMKM, Fasilitasi perkuatan modal bagi 80 koperasi dan Penanganan Pengaduan Kasus 25 KUMKM.

16. Urusan Penanaman Modal

Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 1.078.935.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 96,9%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 20,6%.

Adapun capaian Urusan Penanaman Modal, dapat dilihat dari indikator kunci yaitu : Realisasi Penanaman Modal sampai Tahun 2009 sebesar Rp.115.956.435.723,-.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya Pembinaan Manajemen bagi 13 sentra / kelompok UKM, Temu usaha antar 60 UKM, Temu kemitraan 90 UKM, Kegiatan kemitraan antara pihak swasta dan Lembaga Keuangan dalam memfasilitasi Kebutuhan Modal Usaha diikuti 75 pengusaha dan Pembinaan manajemen usaha mikro, kecil dan menengah terhadap 100 PKL.

17. Urusan Kebudayaan

Pelaksanaan Urusan Kebudayaan selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 1.316.000.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 99,5%. Sedangkan untuk realisasi Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 89,2%.

Adapun capaian Urusan Kebudayaan, dapat dilihat dari indikator kunci Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya, sebanyak 33 kali serta pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Parade Seni Budaya dan Festival Seni Budaya bagi 70 kelompok dan 7 kali Pentas Kesenian Tradisional.

18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 5.631.750.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 98,3%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 46,1%.

Adapun capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dapat dilihat dari indikator kunci Rasio Gelanggang Remaja dengan jumlah penduduk, tingkat capaian kinerjanya meningkat dari 0,20% menjadi 0,28%.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya Pelaksanaan Tri Lomba Juang 20 kali, Pelatihan Ketrampilan Bagi 80 Pemuda, Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba bagi 80 pemuda.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.17.629.405.500,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 90,9%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 39,5%.

Adapun capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dapat dilihat dari indikator kunci Kegiatan pembinaan politik daerah sebanyak 22 kali dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sebanyak 53 kali.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah sebanyak 42 kegiatan, Pelatihan ketrampilan Matrik Hansip bagi 350 orang, dan Pelatihan Ketrampilan PAM SWAKARSA bagi 850 Hansip.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pelaksanaan Urusan ini selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 311.712.505.388,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar

87,8%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 50,8%.

Adapun capaian Urusan ini, dapat dilihat dari indikator kunci sebagai berikut :

- a. Sistem Informasi Manajemen Pemda, sebanyak 20 buah.
- b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, ada di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan Urusan Ketahanan Pangan selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 8.395.600.500,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 92,3%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 29,4%.

Adapun capaian Urusan Ketahanan Pangan, dapat dilihat dari indikator kunci Ketersediaan pangan utama, dengan memakai rumus perhitungan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun dibagi jumlah penduduk dikalikan seribu, menghasilkan tingkat ketersediaan pangan yang semula 572 Kg naik sebesar 27% menjadi 731 Kg.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya dana pendampingan dan dana talangan pembelian gabah bagi 97 LUEP, terwujudnya 3 paket kaji terap kebijakan ketahanan pangan, 11 paket pengembangan lumbung pangan desa dan 20 desa pengembangan Desa Mandiri.

22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.46.795.264.080,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 99%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 16,9%.

Adapun capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dapat dilihat dari indikator kunci sebagai berikut :

- a. PKK aktif, mencapai 90,68%, atau sebanyak 58.950 dari jumlah PKK sebanyak 65.012.
- b. Posyandu aktif, mencapai 100%, atau sebanyak 1.618 Posyandu.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) bagi 516 orang, Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) bagi 674 orang dan Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan melalui pengadaan 300 buku.

23. Urusan Statistik

Pelaksanaan Urusan Statistik selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 908.000.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 99,7%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 49,7%.

Adapun capaian Urusan Statistik, dapat dilihat dari indikator kunci Penyusunan Buku Kabupaten Dalam Angka, Buku PDRB Kabupaten dan Buku Pemerataan Pendapatan yang selalu di susun secara rutin dan tepat waktu.

24. Urusan Kearsipan

Pelaksanaan Urusan Kearsipan selama 5 (lima) dibiayai anggaran sebesar Rp.4.193.396.500,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 61,9%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 52,5%.

Adapun capaian Urusan Kearsipan, dapat dilihat dari indikator kunci Penerapan pengelolaan arsip secara baku, yang telah dilaksanakan oleh semua SKPD.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya pengembangan 14 desa percontohan kearsipan, dan penyuluhan kearsipan.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) dibiayai anggaran sebesar Rp. 8.252.450.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 90,9%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 35,8%.

Adapun capaian Urusan Komunikasi dan Informatika, dapat dilihat dari indikator kunci Publikasi Internet bagi Pemerintah Kabupaten melalui Website milik resmi pemerintah Kabupaten Grobogan, serta pameran/expo dilaksanakan sebanyak 34 kali.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Pengelolaan Website Kabupaten Grobogan, Pengembangan Jaringan Wifi WLAN di 21 SKPD termasuk di kecamatan, Pembekalan Jurnalistik Bagi 60 Pelajar SMA/SMK dan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi bagi 180 orang.

26. Urusan Perpustakaan

Pelaksanaan Urusan Perpustakaan selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.1.539.177.500,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 95,5%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 44,5%.

Adapun capaian Urusan Perpustakaan, dapat dilihat dari indikator kunci Koleksi Judul Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah, yang meningkat dari 14.018 judul menjadi 17.893 judul. Sedangkan Total jumlah Pengunjung perpustakaan selama lima tahun, sebanyak 78.660 pengunjung.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Pengadaan percontohan perpustakaan di 3 desa, Sosialisasi UU Perpustakaan Desa bagi 280 orang dan Pengembangan 1 paket klien Perpustakaan.

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. Urusan Pertanian

Pelaksanaan Urusan Pertanian selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 44.806.513.350,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 96,6%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 29,2%.

Adapun capaian Urusan Pertanian, dapat dilihat dari indikator kunci sebagai berikut :

- a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, naik dari 5,96 ton/Ha menjadi 6,42 ton/Ha.
- b. Kontribusi sektor pertanian sangat dominan terhadap PDRB dibandingkan sektor lain, yaitu rata-rata mencapai 43% Dari total PDRB.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya Operasional Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan sebanyak 14 paket, Monitoring Penyediaan dan Penyaluran Pupuk di 19 Kecamatan, 28 paket Dana Alokasi Khusus Pertanian, 7 lokasi pembuatan Embung mini, 10 unit pengadaan sarana Teknologi Tepat guna Peternakan, pemberdayaan 70 kelompok tani, pendampingan P2HP di 35 desa dan 37 unit Aplikasi Teknologi Penggunaan Pupuk Alternatif.

2. Urusan Kehutanan

Pelaksanaan Urusan Kehutanan selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 6.523.140.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 -2009 sebesar 96,5%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 12,4%.

Adapun capaian Urusan Kehutanan, dapat dilihat dari indikator kunci Kerusakan Kawasan Hutan, yang menurun dari 12.540 ha menjadi 5.515 ha atau menurun menjadi 8,04%.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya pembinaan pelaksanaan pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebanyak 52 paket, peningkatan persediaan produksi bahan baku kayu rakyat sebanyak 12.000 batang, 19 paket hutan desa, 7000 batang

pengembangan hutan produksi pangan dan 3000 paket peningkatan penghijauan dan konservasi alam.

3. Urusan Energi Dan Sumberdaya Mineral

Pelaksanaan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.2.215.450.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 96,2%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 14,%,

Adapun capaian Urusan Energi Dan Sumberdaya Mineral, dapat dilihat dari indikator kunci sebagai berikut :

- a. Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan, mengalami peningkatan dari 75,25 Ha meningkat menjadi 76 Ha.
- b. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, rata-rata mencapai 1,53%.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya Penyusunan Regulasi mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C, Fasilitasi / Bantuan SIPD Galian Golongan C di 3 (tiga) lokasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah (AT) di 19 kecamatan dan emantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konversi Minyak tanah ke LPG 3 kg di 19 kecamatan.

4. Urusan Pariwisata

Pelaksanaan Urusan Pariwisata selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 1.823.650.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 89,5%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 61,5%.

Adapun capaian Urusan Pariwisata, dapat dilihat dari indikator kunci Kunjungan wisata, selama lima tahun mencapai 390.352 wisatawan.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Pengiriman Duta Seni, mengikuti Pelaksanaan Borobudur Internasional Festival (BIF), pembuatan 10 unit kelengkapan sarana wisata dan Terwujudnya Festival Kesenian Tradisional

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 2.482.356.700,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 96,5%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 79,2%.

Adapun capaian Urusan Kelautan dan Perikanan, dapat dilihat dari indikator kunci sebagai berikut :

- a. Produksi perikanan, mencapai 7,83% atau sebesar 665 ton ton dari target sebesar 850 ton.
- b. Konsumsi ikan, mencapai 84% dari target yang telah ditentukan tiap tahunnya.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi BBI di 6 lokasi dan Pembinaan Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terhadap 750 orang.

6. Urusan Perdagangan

Pelaksanaan Urusan Perdagangan selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 28.336.881.313,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 89,7%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 51,2%.

Adapun capaian Urusan Perdagangan, dapat dilihat dari indikator kunci Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB, rata-rata menyumbang sebesar 19,1%.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Koordinasi dan Pengawasan BBM di 19 kecamatan, Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan bagi 19 kelompok, Sosialisasi dan Fasilitasi Sistem Resi Gudang bagi 50 orang, dan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

7. Urusan Industri

Pelaksanaan Urusan Industri selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 7.934.435.728,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 - 2009 sebesar 94,9%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 52,4%.

Adapun capaian Urusan Industri, dapat dilihat dari indikator kunci Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB, mencapai rata-rata sebesar 3,54% dan Pertumbuhan Industri, meningkat dari 0,34% menjadi 1,49%.

Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Koordinasi Modal Ventura bagi Industri Berbasis Teknologi bagi 150 orang, Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi bagi 11 kelompok, Fasilitasi Bagi 27 Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya dan Pemberian fasilitas bantuan pembayaran bunga kepada 150 usaha Mikro dan Kecil.

8. Urusan Transmigrasi

Pelaksanaan Urusan Transmigrasi selama 5 (lima) tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.5.272.555.500,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2006 -

2009 sebesar 83,5%. Sedangkan untuk Tahun 2010 sampai tanggal 31 Agustus mencapai 44,8%.

Adapun capaian Urusan Transmigrasi, dapat dilihat dari indikator kunci Transmigrasi Swakarsa, sebanyak 65 orang pada Tahun 2008 dan 2009. Capaian urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya : Pembinaan dan Pembekalan 320 Calon Transmigran.

IV. TUGAS PEMBANTUAN

Dalam Tahun 2006-2010 Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menerima beberapa Tugas Pembantuan, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan total anggaran sebesar Rp.187.717.695.175,-..

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.177.903.893.000,- meliputi 8 (delapan) Urusan, yang terdiri dari Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Urusan Pertanian, dengan perincian sebagai berikut :

1. Urusan **Pekerjaan Umum**, menerima dari Kementerian Pekerjaan Umum selama 5 (lima) tahun terus menerus dengan anggaran Rp. 17.753.468.000,- terealisasi 96% digunakan untuk Pelatihan Desain Konstruksi, Pelaksanaan Rehabilitasi daerah irigasi dengan Metode Partisipatif, Pelaksanaan Desain Partisipatif, serta Operasional Workshop.
2. Urusan **Perumahan**, menerima dari Kementerian Pekerjaan Umum pada Tahun 2009 dengan anggaran sebesar Rp.5.175.500.000,- terealisasi 99,6% digunakan untuk Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum, dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat.
3. Urusan **Ketenagakerjaan**, menerima dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mulai Tahun 2007 sampai dengan 2010 dengan anggaran sebesar Rp.5.823.027.000,- terealisasi 90%, digunakan untuk Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.
4. Urusan **Pemberdayaan Masyarakat Desa**, menerima dari Kementerian Dalam Negeri mulai Tahun 2007 sampai dengan 2010 dengan anggaran sebesar Rp. 87.972.920.000,- terealisasi 99,9% digunakan untuk Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat melalui kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

5. Urusan **Pertanian**, menerima dari Kementerian Pertanian selama 5 (lima) tahun terus menerus dengan anggaran sebesar Rp. 45.164.323.000,- terealisasi 88,6% yang digunakan untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pengembangan Agribisnis.
6. Urusan **Pendidikan**, menerima dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada Tahun 2006 dengan anggaran sebesar Rp.1.639.155.000,- terealisasi 100% yang digunakan untuk program Pendidikan non Formal meliputi kegiatan kesetaraan Kerjar Paket A, B dan keaksaraan.
7. Urusan **Kesehatan**, menerima dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Tahun 2007 dan 2008 dengan anggaran sebesar Rp.14.375.500.000,- terealisasi 96% yang digunakan untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan, Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan, serta Program Lingkungan Sehat.
8. Urusan **Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** menerima dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Tahun 2007 dan 2009 tanpa disertai Anggaran dengan tugas melaksanakan Program Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Kabupaten.

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi, jumlah anggaran sebesar Rp.9.813.802.175,- meliputi 7 (tujuh) Urusan, terdiri dari Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Urusan Pertanian dan Urusan Perdagangan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Urusan **Pekerjaan Umum**, pada Tahun 2006 dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi 100% digunakan untuk Program Pengelolaan Sungai, Waduk dan Sumber Air lainnya.
2. Urusan **Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**, pada Tahun 2006 dengan anggaran sebesar Rp. 83.425.000,- terealisasi 100% dengan tugas melaksanakan Program Bantuan Modal bergulir bagi Kelompok Usaha dan Fasilitasi Sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga.
3. Urusan **Ketenagakerjaan**, pada Tahun 2007 dan 2008 dengan anggaran sebesar Rp.153.440.000,- terealisasi 84% yang digunakan untuk Program Pelatihan Kewirausahaan dan Bintek Bidang Pelatihan Masyarakat.

4. Urusan **Ketahanan Pangan**, pada Tahun 2008 dan 2009 dengan anggaran sebesar Rp 5.000.000.000,- terealisasi 100% yang digunakan untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dana Stimulus Fiskal dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dana Dekonsentrasi.
5. Urusan **Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**, pada Tahun 2007 dan 2008, dengan anggaran sebesar Rp 610.037.175,- terealisasi 99,8% yang digunakan untuk Program Pelayanan Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi remaja dan Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil berkualitas.
6. Urusan **Pertanian**, selama 3 (tiga) tahun mulai 2006 sampai dengan 2008 dengan anggaran sebesar Rp. 3.837.900.000,- terealisasi 39% yang digunakan untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pengembangan Agribisnis Peternakan.
7. Urusan **Perdagangan**, pada Tahun 2008, dengan anggaran sebesar Rp 29.000.000,- terealisasi 100% yang digunakan untuk Program Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Dalam rangka mendukung terwujudnya kondisi daerah yang kondusif, diperlukan adanya jalinan kerjasama dengan daerah lain yang harmonis, seimbang serta saling menguntungkan. Melalui kerjasama antar daerah, maka potensi ketegangan atau konflik antar daerah sebagai akibat dari ego sektoral *daerahisme* yang berlebihan dapat dieliminir. Disamping itu, daerah dapat mengambil keuntungan dan manfaat dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Dengan demikian akan tercipta kondisi daerah yang kondusif dan mampu mendukung kegiatan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kerjasama antar daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Grobogan sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010, antara lain ; Forum kerjasama Kedungsepur dan Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI), Kerjasama Ketransmigrasian dengan 3 (tiga) kabupaten lain.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak ketiga.

Dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada Tahun 2008 dan Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan kerjasama dengan GT-Z dalam bidang Pengarusutamaan Gender, kerjasama dengan PLAN dalam pembentukan Forum dan Sanggar Anak, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta kerjasama dengan Lembaga Pengkajian

Pembangunan Swadaya Perempuan (LPPSP) Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan anggaran responsif gender.

Disamping itu, dalam pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2009 telah melakukan kerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli berupa pembangunan unit pengolahan sampah organik pasar untuk diolah menjadi pupuk kompos organik di Kota Purwodadi.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah.

Pada Kegiatan Koordinasi dengan Instansi Vertikal diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Grobogan senantiasa membangun hubungan sinergis dengan seluruh jajaran Instansi Vertikal, dengan azas kesetaraan dan saling menghormati guna menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya maupun keamanan dan ketertiban.

Kegiatan yang dilakukan diantaranya Koordinasi dalam rangka pendidikan kebangsaan, menjaga kerukunan antar umat beragama, penanganan bencana alam, menjaga ketentraman dan ketertiban, penyelenggaraan pemilu, Forum Kemuspidaan, Sosialisasi Bidang Hukum, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Badan Koordinasi Pembinaan Pemuda dan Anak Remaja (Bakoppar), penyelenggaraan Ibadah Haji, dan lain-lain.

D. Pembinaan Batas Wilayah.

Kebijakan pembinaan batas wilayah diarahkan pada terwujudnya batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan kabupaten tetangga, karena dengan diketahuinya secara pasti atas batas daerah yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan memudahkan dalam pengelolaan dan pengerahan segala potensi wilayah yang dapat didayagunakan secara terpadu guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan diantaranya, Penetapan dan Penegasan Batas Daerah pada Tahun 2006 dengan Kabupaten Semarang, Tahun 2007 dengan Kabupaten Demak, Tahun 2008 dengan Kabupaten Kudus, Boyolali dan Sragen, Tahun 2010 dengan Kabupaten Pati.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Dalam Pencegahan dan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan potensi bencana alam, penyediaan bahan bantuan bencana alam, melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana, mengoptimalkan peran satgas penanggulangan bencana alam, pembangunan talud-talud penahan tanah di wilayah bahaya tanah longsor, normalisasi saluran dan perbaikan tanggul-tanggul penahan banjir, rehabilitasi hutan dan lain-lain.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus.

Di Kabupaten Grobogan tidak terdapat kawasan khusus. Sementara yang ada adalah kawasan lindung sebagaimana diatur di dalam Perda No. 10 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW), yang meliputi :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, terdiri kawasan yang mempunyai kelerengan diatas 40° seluas $\pm 448,50$ Ha di Kecamatan Grobogan, Brati, Tawangharjo dan Wirosari dan kawasan resapan air yang berada di 30 Desa pada 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tanggunharjo, Kedungjati, Karangrayung, Penawangan, Toroh, Geyer, Pulokulon, Kradenan, Gabus, Klambu dan Grobogan.
2. Kawasan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sempadan sungai seluas ± 7.265 Ha, sempadan waduk (Gambrengan, Sanggeh, Butak, Simo, Nglangon, Kenteng)seluas 149 Ha dan sempadan mata air seluas ± 1.382 Ha.
3. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya seluas $\pm 206,43$ Ha yang meliputi kawasan Bledug Kuwu, Mrapen, Makam Ki Ageng Selo, Makam Ki Ageng Tarub, Goa Lawa dan Goa Macan serta Goa Urang.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan upaya-upaya kondusif, melalui koordinasi dengan jajaran aparat keamanan, baik TNI maupun POLRI dan masyarakat. Sehingga berkat koordinasi lintas sektoral yang mantap, di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 tidak terdapat adanya gangguan baik yang disebabkan konflik berbasis sara, anarkis, separatisme maupun lainnya.

H. Hal lain-lain.

beberapa prestasi dan penghargaan tingkat Nasional yang diperoleh Kabupaten Grobogan dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010, sebagai berikut :

Tahun 2006

Juara I MTQ Tingkat Nasional di Kendari Sulawesi Tenggara untuk cabang Hafidz Qur'an 20 Juz atas nama Mohammad Abdul Salam.

Tahun 2007

1. Juara I Tingkat Nasional Gerakan Nasional Rehabiltasi Hutan dan Lahan (GNRHL).
2. Juara I tingkat Nasional, Kinerja Kelompok Tani "Sumber Jati Makmur" Desa Tegalrejo Kecamatan Wirosari.
3. Juara I Tingkat Nasional, Karate dan Bola Volly POSPENAS (Pekan Olah Raga Pondok Pesantren Nasional).

4. Juara I Tingkat Nasional, Lomba Bibit Sapi hasil IB jantan jenis Brahman, Lokasi Desa kradenan Kecamatan Kradenan.
5. Juara II Tingkat Nasional, Lomba Bibit Sapi hasil IB betina jenis Brahman, lokasi Desa Mojorebo Kecamatan Wirosari.
6. Juara I Tingkat Nasional, Agrobisnis Kedelai oleh Kelompok Tani "Kabul Lestari" Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon.

Tahun 2008

Juara II Tingkat Nasional, cabang Karate Kata, atas nama Xenia Agustina, siswa SMPN 2 Purwodadi.

Tahun 2009

1. Penghargaan Nasional sebagai Pelaksana Terbaik Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
2. Penghargaan Nasional dalam bidang Keluarga Berencana, Manggala Karya Kencana bagi Bupati Grobogan.
3. Penghargaan Adipura untuk kategori Kota Kecil.
4. Penghargaan Presiden atas peningkatan produksi padi lebih dari 5%.
5. Juara I tingkat Nasional, Lomba kelompok tani untuk komoditas padi, atas nama Poktan "Ngudi Luhur", Desa Kluwan, Kecamatan Penawangan.
6. Juara III tingkat Nasional, Lomba Petugas O & P Jaringan Irigasi Nasional. Serta banyak prestasi tingkat Provinsi lainnya.

VI. PENUTUP

Demikian paparan singkat mengenai aspek-aspek kebijakan program maupun implementasinya, baik yang menyangkut permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun pembinaan ketertiban umum dan pembinaan kemasyarakatan sesuai tugas dan wewenang kepala daerah.

Namun kami menyadari, bahwa dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat, serta menyelesaikan persoalan-persoalan daerah secara menyeluruh. Hal ini bukan karena kami tidak atau kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, tetapi semata-mata karena keterbatasan sumber daya yang ada, dan tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat.

Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, melalui forum ini disampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan, dan kepada semua pihak dapat memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang. Demikian juga kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, dukungan dan kerjasamanya dengan baik selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan lahir dan bathin kepada kita semua untuk terus membangun Kabupaten Grobogan yang kita cintai ini semakin maju, mandiri, makmur, dan sejahtera. Amin.

Purwodadi, 12 Nopember 2010.

 **BUPATI GROBOGAN**

H. BAMBANG PUDJIONO, SH